

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Z., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amijoyo, P. S., 2007, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Grand Media Pustaka, Semarang.
- Asshiddiqie, J., 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhari, A. F., 2005, *Menemukan Demokrasi.*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Bandeira, C. L., 2004, *From Legislation to Legitimation, The Role of Portuguese Parliament*, Routledge.
- Barata, A. A., 2004, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Basri, Y. Z., *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budiardjo, M., 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dimiyati, K., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Fachruddin, I., 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Gadjong, A. A., 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gaffar, A., *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Hendrik, M., 2006, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,*”  
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Hlm.  
88.
- Hadikusumo, H., 1985, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,*  
Mandar Maju, Bandung.
- Hariadi, P., 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah,* Salemba Empat, Jakarta.
- Haryono, D., *Identitas dan Elastisitas Negara Hukum Pancasila yang Demokratis,*  
Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hery Susanto, dkk, 2003, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal,* Millenium  
Publisher, Jakarta.
- Hidjaz, K., 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem  
Pemerintahan Daerah Di Indonesia.* Pustaka Refleksi, Makasar.
- Huda, N., 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan  
Problematika,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrahim, J., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyu Media  
Publishing, Malang.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara,* Pustaka Harapan, Jakarta.
- Kelsen, H., 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara,* Nusa Media, Bandung.
- Kuncoro, M., 2014, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah  
Edisi 3,* Erlangga.
- Lubis, S., 1938, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai  
Pemerintah Daerah,* Alumni, Bandung.
- Lutz, D. S., 2006, *Principles of Constitutional Design,* Cambridge University Press.
- Manan, B., 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945,* UNISKA, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah,* Andi, Yogyakarta.
- Masterman, R., 2011, *The Separation of Powers in the Contemporary Constitution,*  
Cambridge University Press.
- Naning, R., 1982, *Aneka Asas Ilmu Negara,* Bina Ilmu, Surabaya.

Phasa, M. K., 2003, *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.

Prayitno, H. J., Thoyibi, M., Sunanda, A., 2001, *Pembudayaan Penulisan Karya Ilmiah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2016, *Buku Panduan Magister Hukum*, Program Magister Hukum, Yogyakarta.

Ridwan H. R., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Said, M., 2005, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang.

Saidi, M. D., 2011, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, S., Mamudji, S., 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suwanda, D., 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, Rosda, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Rosda, Bandung.

Syafrudin, A., 1982, *Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Tarsito, Bandung.

Thontowi, J., *Negara Hukum Kontemporer, Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Yogyakarta, Madyan-Ind Press.

Waluyo, B., 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, H.A.W., 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Radjawali Press, Jakarta.

## **Makalah**

Imawan, R., "Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan," *Work Shop DPRD dan Percepatan Otoda Kerjasama DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Jurusan Pemerintah Fisipol UGM*, 9-10 Oktober 2000.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Makalah Universitas Airlangga*, Surabaya.

Soemantri, S., "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Lembaga Legislatif Dalam Mendorong Terciptanya Pemerintahan Konstitusional Yang Bersih Dan Berwibawa," *Makalah Lokakarya dan Temu Ilmiah Nasional Hukum Indonesia*, 2000.

Soeriaatmadja, A., 2010, *Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara*, BPHN.

### **Jurnal**

Campos, N. F., 2007, *Lobbying, Corruption and Political Influence*, Public Choice, Springer, Vol. 131, Nomor "2, Apr.

Cheibub, J. A., 2006, *Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems*, American Political Science Review, Vol. 100, Nomor 3, August.

Lagona, F., 2007, *A Nonlinear Principal Component Analysis of the Relationship between Budget Rules and Fiscal Performance in the European Union*, Public Choice, Springer, Vol. 130, Nomor 5, Mar.

Ma, J., 2009, *Budgeting for Accountability, A Comparative Study of Budget Reforms in the United States during the Progressive Era and in Contemporary China*, Public Administration Review, Dec., 69, S1, ProQuest.

Smith, K. A., 2006, *Assessing Reforms of Government Accounting and Budgeting*, Public Performance & Management Review, Vol. 30, Nomor 1, Sep.

Sterck, M., 2006, *Trends in Performance Budgeting in Seven Oecd Countries*, Public Performance & Management Review, Vol. 30, Nomor 1, Sep., M.E. Sharpe.

Syafrudin, A., "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia Universitas Parahyangan*, Edisi IV, 2000.

### **Penelitian Ilmiah**

Setiawan, A., 2008, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman," Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Firdaus, D. H., 2012, "Peranan DPRD Dalam Hal Pemberhentian Gubernur Terkait Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi," Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Meygautama, H., 2011, "Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Hak Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja," Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Simanjuntak, S., 2011, "Pelaksanaan Mekanisme Checks and balances Antara DPRD Dan Pemerintah Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

### **Internet**

[Http://international.okezone.com/read/2010/09/30/339/377871/kpkpembahasan-apbn-di-dpr-lahan-korupsi](http://international.okezone.com/read/2010/09/30/339/377871/kpkpembahasan-apbn-di-dpr-lahan-korupsi)

[Https://kbbi.web.id/ideal](https://kbbi.web.id/ideal)

[Http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html](http://muslimpoliticians.blogspot.co.id/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html)

[Http://international.okezone.com/read/2010/09/30/339/377871/kpkpembahasan-apbn-di-dpr-lahan-korupsi](http://international.okezone.com/read/2010/09/30/339/377871/kpkpembahasan-apbn-di-dpr-lahan-korupsi)

[Http://www.keuanganpublik.com/2008/](http://www.keuanganpublik.com/2008/)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5568.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502.

### **Putusan Hakim**

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013